

PREFERENSI AGAMA DAN INKLUSI KEUANGAN ISLAM

Niswatun Hasanah¹

neezwahhasanah393@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹

Universitas Qomaruddin¹

ABSTRACT

The relationship between religious preference and financial inclusion in a number of countries around the world still raises questions. Whether religious preference can increase Islamic financial inclusion is the question that this paper seeks to answer. This article attempts to examine four articles on religious preference and Islamic financial inclusion. This research is a library research, using data in the form of books, articles, and the like. Data analysis used is the method of content analysis (content analysis). The content analysis method is used to determine the extent to which religious preferences increase Islamic financial inclusion. The results of the study show that on the one hand religiosity can affect financial inclusion in various states of the United States of America (US) and in various countries globally. However, higher levels of religiosity are negatively correlated with use of financial services across all levels of society. However, on the other hand, there is a significant relationship between one's level of religiosity and one's reasons for saving at an Islamic financial institution. In addition, Islamic financial inclusion is not only driven by religious factors, but also supported by technological sophistication, literacy, political commitment, regulations, and so on. In Indonesia, Islamic financial inclusion, which is still low, can be increased through optimizing the role of Islamic boarding schools with the kiai or ulema as the central figure.

Keyword: *Religious Preference, Inclusion, Islamic Finance*

ABSTRAK

Hubungan preferensi agama dengan inklusi keuangan di sejumlah negara di dunia masih menimbulkan tanda tanya. Apakah preferensi agama dapat meningkatkan inklusi keuangan Islam adalah pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini. Artikel ini mencoba menelaah empat artikel tentang preferensi agama dan inklusi keuangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan data berupa buku, artikel, dan sejenisnya. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (content analysis). Metode analisis isi digunakan untuk mengetahui sejauh mana preferensi agama dalam meningkatkan inklusi keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di satu sisi religiusitas dapat memengaruhi inklusivitas keuangan di berbagai negara bagian Amerika Serikat (AS) dan di berbagai negara secara global. Akan tetapi, tingkat religiusitas yang lebih tinggi berkorelasi secara negatif dengan penggunaan layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Namun, di sisi lain terdapat hubungan signifikan antara tingkat religiusitas seseorang dan alasan seseorang menabung di lembaga keuangan syariah. Selain itu, inklusi keuangan Islam tidak hanya didorong oleh faktor agama, tetapi juga ditopang oleh kecanggihan teknologi, literasi, komitmen politik, regulasi, dan lain sebagainya. Di Indonesia, inklusi keuangan Islam yang masih rendah, dapat ditingkatkan melalui optimalisasi peranan pesantren dengan tokoh sentralnya kiai atau ulama.

Kata kunci: *Preferensi Agama, Inklusi, Keuangan Islam*

Pendahuluan

Sejak awal 2000-an, banyak pemerintah dan bank sentral memberikan perhatian terhadap inklusi keuangan. Global Findex Database Bank Dunia tahun 2017 melaporkan bahwa sekitar 1,7 miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki rekening di lembaga keuangan. Oleh karena itu, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) berusaha untuk memasukkan peningkatan akses keuangan ke dalam agenda pembangunan utamanya sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Beberapa hasil riset akademis menegaskan bahwa inklusi keuangan dapat mendukung pencapaian SDGs yang lebih luas. Sementara itu, selama dua dekade terakhir pertumbuhan eksponensial dalam keuangan Islam mulai terlihat, dan telah muncul sebagai salah satu sektor keuangan yang tumbuh paling cepat. Menurut 2018 Global Islamic Finance Report (GIFR), industri keuangan Islam global bernilai US\$2,431 triliun pada 2017 dan mencatatkan pertumbuhan 6,02%. Industri ini diperkirakan akan melampaui US\$4 triliun pada tahun 2020.¹

Sementara itu, beberapa negara memang mengikuti sekularisasi. Akan tetapi, pentingnya peranan agama bagi individu meningkat atau tetap kuat. Dalam hal ini, individu melaksanakan penilaian otonom mereka dalam memilih apa yang diyakini dan bagaimana menerapkan keyakinan mereka dalam praktik, yang seringkali mengarah pada proses de-tradisionalisasi, terutama dalam masyarakat industri. Krisis demokrasi dan institusi liberal membutuhkan refleksi atas fenomena ini dan implikasinya.²

Inklusi keuangan, yang menurut Bank Dunia (2018), merupakan tersedianya akses layanan dan produk keuangan yang fungsional (relevan) dan terjangkau oleh individu dan bisnis perlu ditopang oleh agama. Jasa keuangan harus memenuhi kebutuhan khusus individu dan bisnis. Penyedia jasa keuangan bertanggung jawab dan fokus pada keberlanjutan jasa keuangan yang diberikan. Selanjutnya, dalam sistem keuangan inklusif, setiap orang dalam masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan keuangan yang tersedia tanpa banyak diskriminasi. Secara umum, sistem keuangan inklusif memastikan bahwa lembaga keuangan pada dasarnya mengutamakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Inklusi keuangan harus fokus pada penyediaan kredit dan fokus pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan kelompok

¹ M. Mahbubi Ali, Muhammad Rizky Prima Sakti, dan Abrista Devi. Developing An Islamic Financial Inclusion Index For Islamic Banks In Indonesia: A Cross-Province Analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No.4 (2019). DOI: <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1098>

² Emmanuel Amissah dan Katarzyna Świerczyńska. Is Religion a Determinant of Financial Development?. *International Advances in Economic Research* volume 27, pages233-247 (2021)

formal dan rentan lainnya. Selain itu, inklusi keuangan dipengaruhi oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat. Karena perbedaan faktor demografi, sosial, dan ekonomi.³

Ada tiga dimensi yang melekat inklusi keuangan, yaitu: (i) akses ke layanan keuangan; (ii) pendalaman layanan keuangan bagi mereka yang memiliki akses minim jasa; dan (iii) literasi keuangan yang lebih besar sehingga yang ditawarkan produk keuangan dapat membuat informasi pilihan. Dalam rumusan ini, akses merupakan fungsi dari penyediaan layanan dan literasi keuangan dasar. Pendalaman layanan keuangan dibangun di atas akses minimal dan literasi produk keuangan yang lebih besar. Inklusi keuangan mengacu pada akses universal ke berbagai layanan keuangan dengan biaya yang wajar. Ini tidak hanya mencakup produk perbankan, tetapi juga layanan keuangan lainnya, seperti produk asuransi dan ekuitas.⁴

Lalu apa yang dimaksud dengan inklusi keuangan Islam? Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti (2016) mendefinisikan inklusi keuangan Islam sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam sehingga masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inklusi keuangan Islam merupakan sarana untuk mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap praktik keuangan Islam.⁵

Keuangan Islam menyikapi persoalan inklusi keuangan dari dua dimensi: Pertama, dengan mengedepankan konsep profit and loss sharing (PLS) atau pembagian risiko sebagai alternatif pembiayaan konvensional berbasis utang. Dan kedua, melalui metode keuangan sosial Islam, seperti zakat, wakaf, infaq dan qardh hasan, yang melengkapi instrumen PLS.⁶

Tulisan ini mencoba menelaah empat artikel tentang preferensi agama dan inklusi keuangan Islam. Artikel-artikel tersebut adalah *Religiosity and the adoption of formal financial services* oleh Yaling Ji, *Realising financial inclusion in Islamic finance* oleh Akilu Aliyu

³ Fauz Moh'd Khamis, Mohamad Yazid Bin Isa, dan Noraini Yusuff. Constructing Indicators For Islamic Financial Inclusion. *International Journal of Islamic Economics* volume 3, nomor 02, (2021), pp.101-123 DOI: <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i2.3720>

⁴ D Narayana dan Shagishna K. The Role of Religious Faith in Financial Exclusion: An Analysis of Financial Deepening in India. *A Journal of Economics, Politics, and Strategy*. Vol. 2 No. 1(Jan-Feb) (2021). DOI: <https://doi.org/10.55763/ippr.2021.02.01.004>

⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2016, hal. 221

⁶ M. Mahbubi Ali, Muhammad Rizky Prima Sakti, dan Abrista Devi. Developing An Islamic Financial Inclusion Index For Islamic Banks In Indonesia: A Cross-Province Analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No.4 (2019). DOI: <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1098>

Shinkafi, Sani Yahaya, dan Tijjani Alhaji Sani, *Islamic financial inclusion determinants in Indonesia: an ANP approach* oleh Mohammad Mahbubi Ali, Abrista Devi, Hafas Furqani, dan Hamzah Hamzah, dan *Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: the case of Indonesia* oleh Ibrahim Fatwa Wijaya, Arif Rahman Hakim, Nugroho Saputro and Mulyadi Mulyadi. Apakah faktor agama dapat mendorong inklusi keuangan Islam adalah pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data yang digunakan dalam bentuk buku, artikel, dan sejenisnya. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi digunakan untuk mengetahui sejauh mana preferensi agama dalam meningkatkan inklusi keuangan Islam.

Hasil

Penelitian pertama dilakukan oleh Akilu Aliyu Shinkafi, Sani Yahaya, dan Tijjani Alhaji Sani. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa ada sejumlah faktor yang mendorong terwujudnya inklusi keuangan dalam keuangan Islam: Teknologi yang kuat, promosi literasi dan kompetensi keuangan, komitmen politik, infrastruktur fisik dan keuangan yang dapat diakses, keuangan mikro Islam untuk inklusi keuangan, kesadaran inklusif akan produk keuangan dan keuangan Islam, sistem hukum yang efektif untuk keuangan Islam inklusif, kebutuhan regulasi untuk keuangan Islam yang inklusif, dan faktor religiusitas.

Teknologi yang canggih mengindikasikan kemampuan lembaga keuangan Islam untuk mengadopsi teknologi keuangan digital yang sesuai dengan syari'ah, penyediaan aplikasi keuangan Islami potensial yang dapat memberikan akses ke data dan transaksi pelanggan yang dapat dicapai dengan layanan ponsel MPS, merancang produk keuangan Islami digital oleh penyedia layanan, dan digitalisasi identitas pelanggan dan pembayaran tunai kemungkinan. Kecanggihan teknologi ini akan menciptakan daya tarik sebagian besar masyarakat yang tidak mengetahui dunia perbankan. Lembaga keuangan Islam harus selalu waspada dan siap untuk mendamaikan teknologi yang muncul, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan.

Selain meningkat akses keuangan di negara-negara Muslim, upaya yang sangat penting dilakukan adalah meningkatkan literasi dan kecakapan keuangan. Keterampilan dan

pengetahuan keuangan adalah cara yang menarik untuk memahami layanan keuangan Islam, dan merupakan pilihan terbaik dari produk keuangan Islami yang relevan untuk kepuasan kebutuhan konsumen dan perlindungan serta memahami dokumen dan bahasa industri keuangan Islam adalah beberapa aspek penting dalam mewujudkan pengembangan keuangan yang inklusif.

Mewujudkan inklusi keuangan di dunia Muslim membutuhkan komitmen dan arah politik yang ulet. Negara-negara anggota OKI, Bank Pembangunan Islam, lembaga dan pusat keuangan Islam global, regulator dan pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan publik dan swasta harus berkolaborasi untuk mencapai keberhasilan layanan keuangan Islam yang efektif, akses, kapabilitas keuangan Islam, produk keuangan Islam yang inovatif, dan mekanisme pengiriman yang sangat baik dari bisnis keuangan Islami.

Akses ke infrastruktur fisik dan keuangan dapat berfungsi sebagai mekanisme positif dan signifikan menuju pengakuan inklusi keuangan di dunia Muslim dan sekitarnya. Keakraban dengan teknologi keuangan modern dan penggunaan infrastruktur fisik dan keuangan yang efisien di lembaga keuangan Islam di daerah pedesaan dan perkotaan dapat membantu terwujudnya inklusi keuangan dan menarik lebih banyak partisipasi di dunia industri.

Keuangan mikro Islam memiliki peluang yang besar dan potensial untuk mencapai inklusi keuangan melalui kesadaran akan populasi Muslim yang besar, sarana sosial Islam, pinjaman tanpa bunga, layanan dan produk keuangan yang efektif.

Memang ada hubungan positif yang kuat antara tingkat kesadaran pelanggan dan keputusan pemanfaatan layanan pelanggan. Akan tetapi, ada kebutuhan, kesadaran, dan komitmen para peneliti, akademisi, praktisi, profesional, bankir, dan pembuat kebijakan untuk meingkatkan inklusi keuangan Islam.

Pertumbuhan, perkembangan, dan implementasi yang efektif keuangan Islam juga bergantung pada kerangka hukum dan peraturan yang tersedia dan inklusif. Singkatnya, inklusi keuangan Islam akan berkembang secara efektif jika terdapat sistem regulasi dan hukum yang kuat dan sehat di industri ini. Hal terpenting yang membutuhkan perhatian regulator adalah memperbaiki infrastruktur regulasi dan keuangan produk dan layanan keuangan Islam, yang dapat menghasilkan atmosfer yang memungkinkan melalui inklusi keuangan.

Faktor agama, meskipun perbankan Syariah sangat akrab dengan masyarakat Muslim di Malaysia, mayoritas penduduk masih mendukung perbankan konvensional. Beberapa

penelitian mengungkapkan bahwa motivasi agama bukanlah ukuran utama bagi perbankan syariah. Beberapa non-Muslim mengambil bagian dalam perbankan syariah karena mereka menganggapnya menguntungkan secara komersial. Para bankir syariah seharusnya tidak hanya fokus pada mempromosikan faktor-faktor Islam, tetapi juga kualitas layanan keuangan yang dibutuhkan (Dusuki dan Abdullah, 2006). Religiusitas memiliki pengaruh positif yang substansial pada penerimaan perbankan syariah dan layanan keuangan (Echchabi dan Aziz, 2012). Untuk meningkatkan inklusi keuangan Islam, negara-negara dengan jumlah besar populasi Muslim dan negara-negara dengan keanggotaan OKI memiliki peluang yang mungkin untuk mewujudkan inklusi keuangan daripada yang lain.⁷

Penelitian kedua dilakukan oleh Yaling Ji. Untuk melihat hubungan antara religiusitas dan inklusi keuangan, Ji melihat bagaimana religiusitas, sebagai bentuk ikatan sosial, dapat memenuhi permintaan akan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Hasil penelitian Ji menunjukkan bahwa religiusitas dapat memengaruhi inklusivitas keuangan di berbagai negara bagian Amerika Serikat (AS) dan di berbagai negara secara global. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat religiusitas yang lebih tinggi berkorelasi secara negatif dengan penggunaan layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bentuk ikatan sosial, religiusitas dapat memenuhi permintaan akan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan. *Pertama*, kelompok religius yang kuat dengan keanggotaan yang cukup besar dapat menciptakan sumber daya dengan memberikan manfaat pemantauan kreditor. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatasi masalah yang terkait dengan informasi asimetris dan beroperasi dengan biaya lebih rendah pada skala lokal dengan administrasi yang lebih sedikit. Selain itu, dalam masyarakat dengan jaringan agama yang kuat, kreditor informal juga dapat memanfaatkan berbagai informasi dalam komunitas agama. Ini memberi mereka informasi yang lebih baik tentang peminjam dan kondisi lokal, dan memungkinkan mereka untuk memaksakan kontrak pinjaman kontingen negara bagian dan memberikan penegakan yang lebih baik untuk pembayaran kembali (Stiglitz, 1990). Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas dapat mengakibatkan biaya yang lebih rendah.

Kedua, kewajiban sosial dalam jaringan agama yang kuat dapat mengurangi *moral hazard* dengan mengerahkan biaya sosial jika terjadi wanprestasi. Individual juga lebih

⁷ Akilu Aliyu Shinkafi, Sani Yahaya, dan Tijjani Alhaji Sani. Realising financial inclusion in Islamic finance. *Journal of Islamic Marketing* Vol. 11 No. 1, 2020 pp. 143-160. DOI 10.1108/JIMA-02-2017-0020

cenderung mengumpulkan risiko dengan sesama anggota jaringan mereka (Feigenberg et al., 2013) dan peminjam keuangan informal sering menggunakan modal sosial seperti "jaminan" ketika mereka mengambil pinjaman dari kreditor. Agunan sosial ini dapat timbul dari ikatan mereka yang ada sebagai anggota komunitas agama dan mencerminkan nilai hubungan mereka. Oleh karena itu, dalam masyarakat dengan ikatan agama yang kuat dan modal sosial yang tinggi, pinjaman berbasis masyarakat dan informal mungkin lebih mudah tersedia dibandingkan dengan masyarakat dengan ikatan sosial yang lemah.

Ketiga, jaringan agama yang kuat dapat menghentikan permintaan keseluruhan untuk sumber-sumber keuangan formal dengan cara lain. Orang-orang yang mengalami jaringan agama dan sosial yang kuat mungkin memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar jaringan agama dan dapat mengembangkan kepercayaan yang lebih rendah terhadap sistem keuangan formal financial (Weber, 1905; Banfield, 1958). Keyakinan agama juga dapat menghilangkan penekanan akuisisi material yang dapat mempengaruhi konsumsi dan kegiatan bisnis dan penggunaan layanan keuangan. Akhirnya, religiusitas juga dapat membentuk sistem pendidikan dalam masyarakat, di mana komunitas agama dapat memberikan lebih sedikit sumber daya untuk pendidikan keuangan yang mendukung agenda yang lebih religius.⁸

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ibrahim Fatwa Wijaya, Arif Rahman Hakim, Nugroho Saputro, dan Mulyadi Mulyadi. Mereka ingin melihat hubungan antara tingkat religiusitas dan keputusan menabung di BMT. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat religiusitas seseorang dan alasan seseorang menabung di BMT. Selain itu, produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam membentuk alasan tertinggi seseorang menabung di BMT, diikuti oleh kualitas layanan, rekomendasi dari teman, dan lokasi. Akhirnya, tujuan bisnis adalah alasan utama seseorang bertransaksi di BMT dan perbankan konvensional. Namun, tidak ada hubungan signifikan antara tingkat religiusitas dan keputusan untuk bertransaksi, baik di BMT maupun perbankan konvensional.⁹

⁸ Yaling Ji. Religiosity and the adoption of formal financial services. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.11.002>

⁹ Ibrahim Fatwa Wijaya, Arif Rahman Hakim, Nugroho Saputro, dan Mulyadi Mulyadi. Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: the case of Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*. DOI 10.1108/JIMA-09-2018-0160

Penelitian terakhir dilakukan oleh Mohammad Mahbubi Ali, Abrista Devi, Hafas Furqani, dan Hamzah Hamzah¹⁰. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh dua pendorong utama: penawaran dan permintaan. Hal ini menjadi acuan bagi regulator dalam merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk memperkuat inklusi keuangan Islam di Indonesia. Upaya perintis untuk mengidentifikasi faktor-faktor khas yang dalam tingkat inklusi keuangan Islam di Indonesia dengan menganalisis pendapat ahli dari berbagai kelompok pemangku kepentingan keuangan Islam di antaranya pendapat dan tanggapan dari akademisi, regulator, dan praktisi.

Menurut Dusuki, sebagai badan usaha yang didirikan berdasarkan prinsip syariah, keuangan Islam sering dipandang sebagai sektor potensial yang berkontribusi positif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan inklusi keuangan. Keuangan Islam dapat meningkatkan akses masyarakat ke berbagai layanan keuangan sambil mematuhi seperangkat nilai-nilai etika. Menurut Salleh, Dana Moneter Internasional (2018) juga mengakui bahwa keuangan Islam mempromosikan kesejahteraan ekonomi, membangun keadilan sosial-ekonomi, dan pemerataan pendapatan dan stabilitas keuangan. Misalnya, lembaga Zakat dapat membantu penerima zakat dalam memperbaiki situasi keuangan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka.

Pasar keuangan Islam di Indonesia selama tiga dekade terakhir berevolusi dan berkembang secara eksponensial, muncul sebagai yurisdiksi penting dalam industri keuangan Islam global, berada di tingkat keempat pada tahun 2018 setelah Malaysia, Bahrain dan Uni Emirat Arab (Kerjasama Syariah untuk Pembangunan Sektor Swasta, 2019). Sebagian besar studi yang ada tentang determinan inklusi keuangan berada dalam konteks keuangan konvensional, dan di yurisdiksi lain (Demirgüç-Kunt dan Klapper, 2013; Allen dkk., 2012; Kimutai, 2015; Zins dan Weill, 2016; Clamara dkk., 2014; Kostov dkk., 2015). Oleh karena itu, studi ini melihat kesenjangan dengan mengkaji determinan inklusi keuangan Islam di Indonesia.

Determinan inklusi keuangan adalah bagian dari proses pengambilan keputusan, yang membantu pemerintah mengambil keputusan yang paling tepat. Analytical Network Process (ANP) dipilih dalam penelitian ini untuk menemukan determinan inklusi keuangan Islam

¹⁰ Mohammad Mahbubi Ali, Abrista Devi, Hafas Furqani, dan Hamzah Hamzah. Islamic Financial Inclusion Determinants in Indonesia: an ANP Approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. DOI 10.1108/IMEFM-01-2019-0007

karena dapat memberikan kerangka umum untuk proses pengambilan keputusan, yang tidak memerlukan asumsi apa pun. Adapun fungsi utama ANP menyediakan pengambilan keputusan, fitur yang memungkinkan manajer dan pemangku kepentingan untuk sampai pada keputusan yang tepat melalui pendapat ahli. Banyak permasalahan yang ada di industri perbankan yang tidak dapat diselesaikan melalui langkah-langkah kuantitatif saja. Model ANP menerapkan data primer melalui beberapa langkah, yaitu dekomposisi model melalui tinjauan pustaka dan focus group discussion (FGD); metode kuantitatif melalui kuesioner berpasangan, sintesis dan analisis. Variabel awal berasal dari literatur inklusi financial, yang digunakan untuk membangun kerangka kerja ANP. Responden FGD dalam studi ini terdiri dari sepuluh kepribadian paling berpengetahuan dalam field inklusi keuangan Islam di Indonesia, mewakili tiga kelompok ahli yang berbeda: praktisi, akademisi, dan regulator.

Konstruksi model diimplementasikan dengan melakukan FGD dengan mengundang sepuluh ahli dari berbagai latar belakang untuk mengembangkan kerangka ANP tentang determinan inklusi keuangan Islam, baik dari faktor permintaan maupun faktor penawaran. Faktor permintaan tersebut meliputi aspek sosial ekonomi, literasi keuangan, komitmen keagamaan dan pengaruh sosial. Faktor pasokan adalah infrastruktur, produk dan layanan; modal manusia, serta kebijakan dan regulasi. Kerangka kerja ANP ini kemudian divalidasi oleh seorang ahli.

Hasil ANP secara keseluruhan menunjukkan bahwa determinan inklusi financial Islam dari sisi permintaan, berdasarkan tingkat signifikansi mereka, adalah literasi keuangan, diikuti oleh komitmen agama, faktor sosial ekonomi, dan sosial. Berdasarkan prioritas terperinci dari masing-masing sub-kelompok faktor permintaan, hasil ANP secara keseluruhan menemukan bahwa penentu terpenting inklusi keuangan Islam di bawah kluster literasi keuangan adalah pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan. Dua elemen yang paling signifikan dari komitmen agama adalah ketakutan akan hukuman ilahi dan komitmen terhadap produk bebas bunga. Sementara itu, pengaruh dari seorang pemimpin informal dan pengaruh keluarga adalah dua penentu terpenting di bawah sosial dalam pengaruh kelompok.

Untuk klaster *human capital*, analisis ANP menemukan bahwa responden secara keseluruhan sepakat dalam mempertimbangkan pemahaman dan pengetahuan serta background pendidikan sebagai dua faktor terpenting inklusi keuangan Islam, untuk klaster produk dan jasa, sebagian besar responden setuju bahwa biaya keamanan dan transaksi adalah dua penentu paling penting dari inklusi keuangan Islam. Cluster infrastruktur: saluran

distribusi mengambil prioritas tertinggi, sedangkan kesiapan fintech adalah prioritas paling sedikit kebijakan dan regulasi cluster: insentif dan inisiatif mengambil prioritas tertinggi, sedangkan regulasi fintech menunjukkan prioritas paling sedikit.

Berdasarkan hasil ANP, studi tersebut menemukan bahwa inklusi keuangan Islam di Indonesia ditentukan oleh dua pendorong utama, yaitu permintaan dan penawaran. Di sisi permintaan, literasi keuangan adalah pendorong utama inklusi keuangan Islam. Sejumlah besar literatur empiris menunjukkan bahwa literasi adalah prediktor yang sempurna untuk permintaan produk dan layanan keuangan (Rastogi dan Ragabiruntha, 2018; Cohen dan Nelson, 2011; Chibba, 2009). Bassir dkk, (2014) berpendapat bahwa tingkat pengetahuan dan religiusitas mempengaruhi penggunaan produk dan layanan keuangan Islam di kalangan umat Islam. Ramakrishnan (2012) menyimpulkan bahwa literasi keuangan Islam merupakan solusi terpenting untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam sistem keuangan Islam.

Komitmen keagamaan memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan Islam. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Guiso et al. , 2002; Barro dan Mitchell, 2004; Gerrans dkk. , 2009; Khan dan Khanna, 2010; Demirgüç-Kunt dan Klapper, 2012a, 2012b; Echchabi dan Aziz, 2012; Naceur dkk. , 2017; Zulhibri, 2016; Hassan dkk. , 2018). Jouti (2018) menyimpulkan bahwa kepatuhan syariah merupakan katalis utama bagi umat beragama yang tidak memiliki rekening bank untuk mengadopsi produk keuangan Islam. Umat Islam di Indonesia pada umumnya beragama. Pew Research Center Surveys pada tahun 2017 menemukan bahwa 93% Muslim Indonesia menganggap agama sangat penting dan sebagai cara hidup, sedangkan 84% dari mereka melakukan doa sehari-hari (Lipka, 2017). Namun demikian, faktor-faktor lain juga berkontribusi pada masalah eksklusi keuangan di Indonesia, seperti tidak adanya kebutuhan, hambatan lokasi, prosedur administrasi yang rumit, kurangnya dokumen yang diperlukan dan fitur harga /produk yang tidak kompatibel.

Anehnya, faktor sosial-ekonomi kurang memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan Islam di Indonesia. Temuan ini sesuai dengan literatur sebelumnya yang berpendapat bahwa faktor sosial ekonomi memberikan positif yang cukup besar pada inklusi keuangan (Allen et al. , 2012; Clamara dkk. , 2014; Naceur et al., 2017; Zins dan Weill, 2016; Wang dan Guan, 2017).

Melihat dari variabel masing-masing cluster, pengetahuan tentang keuangan dan perilaku keuangan adalah dua prioritas literasi keuangan, sedangkan rasa takut pada hukum Tuhan dan komitmen untuk menggunakan produk bebas bunga adalah dua prioritas utama di bawah

kluster komitmen keagamaan. Di sisi lain, prioritas kluster sosial ekonomi adalah pendidikan dan status ekonomi. Penelitian ini menegaskan penelitian sebelumnya, dengan alasan bahwa pendidikan dan pendapatan sesuai secara positif dengan inklusi keuangan (Abel et al. , 2018; Kimutai, 2015; Allen dkk. , 2012; Clamara dkk. , 2014; Naceur dkk. , 2017; Zins dan Weill, 2016). Orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung dimasukkan secara fisiral. Ini karena keuntungan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akan meningkatkan akses ke instrumen keuangan. Demikian pula, semakin banyak orang berpenghasilan, semakin besar kemungkinan mereka untuk dimasukkan secara fisiral. Ini, mungkin, karena kemampuan keuangan mereka yang lebih tinggi dan eksposur terhadap transaksi perbankan formal.

Akhirnya, seorang pemimpin informal dan pengaruh keluarga melayani dua prioritas utama sosial dalam pengaruh kelompok. Hasil ini konsisten dengan temuan literatur sebelumnya seperti Fox et al. (2000), Shim dkk. (2010) dan Xiao dkk. (2007). Peran pemimpin informal juga telah dibahas oleh Pescosolido (2001), Durham dkk. (1997) dan Wheelan dan Johnston (1996). Menurut mereka, seorang pemimpin informal mengasumsikan yang terbesar pada persepsi orang-orang, keyakinan, dan harapan. Nienhaus dan Brauksiepe (1997), di sisi lain, menambahkan nilai-nilai altruistik sebagai karakteristik penting bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam lembaga keuangan di Bangladesh. Dengan demikian, hampir semua pemimpin informal didirikan melalui komunitas (baik komunitas formal maupun informal).

Beralih ke sisi penawar, *human capital* menjadi penentu terpenting inklusi keuangan Islam. Temuan ini menegaskan studi sebelumnya (Loo, 2010; Bukaresi dkk. , 2015), dengan alasan bahwa kesadaran dan sikap sosial adalah indikator kinerja utama yang penting dalam mengevaluasi daya saing karyawan IFI. Kimutai (2015) menjelaskan bahwa agen perbankan harus menawarkan kualitas layanan yang luar biasa untuk semua segmen pelanggan. Memiliki manajemen kerja berbasis pengetahuan dan sumber daya manusia yang kompeten sangat penting di sektor industri, khususnya IFI. Bontis (1998) berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan bagian dari modal struktural, yang memiliki fungsi untuk memperoleh dan menggunakan modal konsumen untuk keberhasilan suatu organisasi. Namasivayam dan Denizci (2006) menemukan peran penting sumber daya manusia dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara organisasi. Dengan demikian, kurangnya sumber daya

manusia dan buta huruf keuangan yang tinggi dapat menghalangi banyak orang untuk mendapatkan manfaat layanan keuangan. (Arora, 2012).

Selain itu, produk dan layanan juga berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan Islam. Fitur yang ditawarkan oleh produk dan layanan akan sangat menentukan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam lembaga keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, para responden menyarankan agar produk keuangan Islam memastikan fitur-fitur berikut: aman dan terjamin, terjangkau, dibuat khusus, dan agunan yang lebih baik fleksibel dan persyaratan dokumentasi yang lebih mudah. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Beck et al. , 2008; Allen dkk. , 2012).

Menariknya, studi ini juga mengungkapkan bahwa infrastruktur, serta kebijakan dan peraturan, adalah faktor yang kurang signifikan dalam inklusi keuangan Islam. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan peran vital infrastruktur dan regulasi dalam inklusi keuangan (Allen et al. , 2012; Kimutai, 2015; Zins dan Weill, 2016; Umar, 2017; Abel dkk. , 2018; Morgan dkk. , 2018; Asadov dan Mogilevskii, 2018).

Mengenai variabel masing-masing klaster di bawah faktor suplai, pemahaman dan pengetahuan, serta latar belakang pendidikan adalah dua penentu utama di bawah klaster human capital. Keamanan biaya transaksi adalah dua prioritas utama dalam kluster produk dan layanan. Saluran distribusi dan konektivitas jaringan adalah dua prioritas utama dalam kluster infrastruktur. Terakhir, insentif dan inisiatif, serta regulasi literasi merupakan dua elemen terpenting dalam klaster kebijakan dan regulasi. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa insentif yang tepat sangat penting untuk memfasilitasi akses keuangan yang mudah dan terjangkau ke segmen berpenghasilan rendah. Misalnya, segmen berpenghasilan rendah perlu dikecualikan dari lingkup PMK (Peraturan Menteri Keuangan–Peraturan Menteri Keuangan) No. 137/PMK.03/2011 tentang Perpajakan bagi Bank Syariah di Indonesia.

Dalam penyelidikannya terhadap determinan inklusi keuangan Islam di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan Islam di Indonesia bergantung pada sisi permintaan dan sisi penawaran. Determinan inklusi keuangan Islam dari sisi permintaan, berdasarkan tingkat signifikansi mereka, adalah literasi keuangan (0,2759), komitmen keagamaan (0,2215), sosial ekonomi (0,1893) dan pengaruh sosial (0,1759). Kedua, determinan inklusi keuangan Islam dari sisi supply, yang diberi peringkat berdasarkan tingkat significance mereka, adalah human capital (0,3170), produk dan jasa (0,2427), kesiapan infrastruktur (0,1799) dan kebijakan dan regulasi (0,1759).

Oleh karena itu, studi ini mengusulkan bahwa agenda inklusi keuangan Islam harus fokus pada peningkatan literasi keuangan, modal manusia dan produk dan layanan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menanamkan literasi keuangan Islam, khususnya di daerah-daerah mayoritas Muslim. Oleh karena itu, modul keuangan Islam harus menjadi salah satu komponen utama dalam kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, regulator disarankan untuk meninjau kembali PMK No. 137/PMK.03/2011 untuk menciptakan *level-playing field* ke segmen berpenghasilan rendah.

Studi ini juga merekomendasikan hal-hal berikut untuk inklusi keuangan Islam (IFI). *Pertama*, perlunya mengembangkan pendekatan dan strategi sistematis untuk meningkatkan pengetahuan keuangan dan literasi segmen berpenghasilan rendah dengan melibatkan para pemimpin agama informal dan memperkenalkan program pendidikan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. *Kedua*, perlunya meningkatkan kompatibilitas produk dan layanan mereka dengan menawarkan prosedur dan persyaratan dokumentasi yang lebih mudah, harga terjangkau, layanan proaktif, agunan yang fleksibel, produk berbasis PLS; dan produk bersubsidi. *Ketiga*, memperkuat kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia keuangan Islam melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan kapasitas, program kesadaran sosial dan program penciptaan budaya risiko. Dan *keempat*, meningkatkan infrastruktur IFI dengan membuka kunci/menjangkau lebih banyak daerah terpencil; memperluas konektivitas network; dan memanfaatkan fintech dan konektivitas seluler.

Diskusi

Inklusi keuangan, menurut Word Bank (2016), adalah akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal bertransaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berdasarkan Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03 % dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 %. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan formal (ojk.go.id). Sementara itu, religiusitas adalah potensi beragama atau berkeyakinan kepada Tuhan. Dengan kata lain, religiusitas mengindikasikan kepercayaan adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta (Yulianto, 2014).

Mengingat meningkatnya minat dalam religiusitas dan dampaknya terhadap hasil ekonomi, terdapat kontribusi dalam melakukan investasi yang luas ke dalam efek religiusitas pada lingkungan keuangan. Sejalan dengan teori-teori yang ada, religiusitas ditemukan memiliki efek negatif pada inklusivitas sistem keuangan dalam masyarakat. Hasilnya melengkapi hasil penelitian terbaru yang memvalidasi pentingnya religiusitas dan praktik keagamaan dalam mempengaruhi berbagai aspek pembangunan ekonomi. Ini termasuk inovasi (Bénabou et al., 2015), kepercayaan sosial (Berggren dan Bjørnskov, 2011), sikap ekonomi (Guiso et al., 2003) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan performances (Barro dan McCleary, 2003; Campante dan Yanagizawa-Drott, 2015; Durlauf et al., 2012). Penelitian ini menambah pemahaman kita tentang efek budaya pada hasil ekonomi, sebuah bidang yang telah mengumpulkan minat mempertimbangkan dalam beberapa tahun terakhir (lihat Alesina dan Giuliano (2015) untuk survei tentang budaya dan dampaknya terhadap institusi dan Nunn (2012) untuk tinjauan budaya dan perkembangan sejarah ekonomi).

Dengan kata lain, religiusitas bisa menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan ekonomi seseorang. Karena pada dasarnya religiusitas dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam memahami sikap dan bentuk ekonomi (Guiso, L; 2003). Definisi religiusitas sebagai "sejauh mana seseorang berkomitmen pada agama yang dianutnya dan ajarannya, seperti sikap dan perilaku individu tersebut dengan komitmen ini". Kita mungkin berharap bahwa di kalangan Muslim, tingkat religiusitas dapat bervariasi (Abou-Youssef et al. , 2015). Dalam Islam, seseorang dapat dikategorikan sebagai muslim yang "baik" jika ia takut kepada penciptanya (lihat Al-Qur'an 3:102 dan Al-Qur'an 33:70). Takut akan Tuhan dapat mendorong seseorang untuk mematuhi apa yang dianggap baik (halal) dan menghindari apa yang adadianggap buruk (haram) (Souiden dan Rani, 2015). Ahmad dkk. (2008) menemukan bahwa ada hubungan antara tingkat religiusitas seseorang dengan keputusan untuk menggunakan perbankan syariah.

Menurut M. Kabir Hassan, Shadiya Hossain dan Omer Unsal, ada potensi untuk mengembangkan keuangan Islam sebagai sarana untuk meningkatkan akses keuangan di negara-negara tertentu. Sebagian besar negara OKI telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses keuangan. Akan tetapi, belum ada komitmen yang jelas untuk mereformasi perbankan syariah dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan inklusi keuangan Islam, khususnya perbankan syariah. Peminjaman merupakan faktor utama inklusi keuangan. Individu yang lebih religius cenderung tidak

menggunakan pemberi pinjaman komersial sebagai sumber pinjaman jika tidak terdapat bank syariah secara luas. Mereka akan memiliki lebih banyak akses ke pinjaman yang sesuai dengan syariah, yang akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam bisnis, properti, membayar untuk keadaan darurat medis, atau pengeluaran rumah tangga lainnya. Intinya, ada kebutuhan yang lebih besar untuk keuangan Islam di negara-negara tertentu yang mungkin dapat mendorong perkembangan keuangan Islam inklusif yang lebih besar di pasar.¹¹

Sementara itu, inklusi keuangan syariah di Indonesia yang masih rendah. Ini bisa diatasi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki umat Islam. Oleh karena itu, peranan pesantren perlu dioptimalkan. Pesantren selama ini hanya menjadi penonton atau pengguna saja. Padahal menurut Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dengan jumlah pesantren yang sangat banyak, bisa berpotensi menjadi jaringan fisik layanan keuangan syariah yang luar biasa. Tidak hanya itu, pesantren mempunyai kelebihan dalam hal pusat edukasi dan dakwah bagi masyarakat. Kredibilitas yang dimiliki pesantren juga tidak perlu dipertanyakan.¹²

Pesantren dengan tokoh sentralnya kyai atau ulama mempunyai peran strategis dalam sosialisasi lembaga keuangan syariah dengan alasan ulama adalah sebagai pewaris para nabi dengan kedudukan dan predikat sebagai ahlu ilmi (pakar) ilmu, ahlu khashyah (orang yang taqwa), ahlu bashirah (memiliki kompetensi), dan sebagainya. Dengan kedudukan dan predikat di atas, kyai atau ulama memiliki kesempatan untuk memfungsikan perannya dengan mensosialisasikan sistem keuangan Islam.

Kesimpulan

Dari hasil diskusi di atas, kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Sebagaimana terdapat pada artikel pertama, ada sejumlah faktor yang mendorong terwujudnya inklusi keuangan dalam keuangan Islam: Teknologi yang kuat, promosi literasi dan kompetensi keuangan, komitmen politik, infrastruktur fisik dan keuangan yang dapat diakses, keuangan mikro Islam untuk inklusi keuangan, kesadaran inklusif akan produk keuangan dan keuangan

¹¹ M. Kabir Hassan, Shadiya Hossain And Omer Unsal. Religious Preference And Financial Inclusion: The Case For Islamic Finance (Ed) M. Kabir Hassan And Mamunur Rashid Dalam Management Of Islamic Finance. UK: Emerald Publishing Limited, 2019. hal. 110.

¹² Achi Hartoyo, Aldiansyah Nurrahman. Atasi Masalah Inklusi Keuangan Syariah lewat Pesantren. Sumber: <https://knks.go.id/berita/167/atasi-masalah-inklusi-keuangan-syariah-lewat-pesantren?category=1>

Islam, sistem hukum yang efektif untuk keuangan Islam inklusif, kebutuhan regulasi untuk keuangan Islam yang inklusif, dan faktor religiusitas.

Artikel kedua menunjukkan bahwa religiusitas memang dapat memengaruhi inklusivitas keuangan di berbagai negara bagian Amerika Serikat (AS) dan di berbagai negara secara global. Akan tetapi, tingkat religiusitas yang lebih tinggi berkorelasi secara negatif dengan penggunaan layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, terdapat hubungan signifikan antara tingkat religiusitas seseorang dan alasan seseorang menabung di BMT, sebagaimana ditunjukkan oleh artikel ketiga. Selain itu, produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam membentuk alasan tertinggi seseorang menabung di BMT, diikuti oleh kualitas layanan, rekomendasi dari teman, dan lokasi. Akhirnya, tujuan bisnis adalah alasan utama seseorang bertransaksi di BMT dan perbankan konvensional. Namun, tidak ada hubungan signifikan antara tingkat religiusitas dan keputusan untuk bertransaksi, baik di BMT maupun perbankan konvensional.

Artikel terakhir memperlihatkan bahwa inklusi keuangan Islam di Indonesia bergantung pada sisi permintaan dan sisi penawaran. Determinan inklusi keuangan Islam dari sisi permintaan, berdasarkan tingkat significance mereka, adalah literasi keuangan (0,2759), komitmen keagamaan (0,2215), faktor sosial ekonomi (0,1893) dan pengaruh sosial, sosial (0,1759). Sedangkan determinan inklusi keuangan Islam dari sisi penawaran, yang diberi peringkat berdasarkan tingkat significance mereka, adalah human capital (0,3170), produk dan jasa (0,2427), kesiapan infrastruktur (0,1799) dan kebijakan dan regulasi (0,1759).

Referensi

- li, Mohammad Mahbubi, Abrista Devi, Hafas Furqani, dan Hamzah Hamzah. Islamic Financial Inclusion Determinants in Indonesia: an ANP Approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. DOI 10.1108/IMEFM-01-2019-0007
- Ali, M. Mahbubi, Muhammad Rizky Prima Sakti, dan Abrista Devi. Developing An Islamic Financial Inclusion Index For Islamic Banks In Indonesia: A Cross-Province Analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No.4 (2019). DOI: <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1098>
- Amissah, Emmanuel dan Katarzyna Świerczyńska. Is Religion a Determinant of Financial Development?. *International Advances in Economic Research* volume 27, pages233–247 (2021)
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2016, hal. 221

- D Narayana dan Shagishna K. The Role of Religious Faith in Financial Exclusion: An Analysis of Financial Deepening in India. *A Journal of Economics, Politics, and Strategy*. Vol. 2 No. 1 (Jan-Feb) (2021). DOI: <https://doi.org/10.55763/ippr.2021.02.01.004>
- Hassan, M. Kabir, Shadiya Hossain And Omer Unsal. *Religious Preference And Financial Inclusion: The Case For Islamic Finance* (Ed) M. Kabir Hassan And Mamunur Rashid Dalam Management Of Islamic Finance. UK: Emerald Publishing Limited, 2019.
- Ji, Yaling. Religiosity and the adoption of formal financial services. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.11.002>
- Khamis, Fauz Moh'd, Mohamad Yazid Bin Isa, dan Noraini Yusuff. Constructing Indicators For Islamic Financial Inclusion. *International Journal of Islamic Economics* volume 3, nomor 02, (2021), pp.101-123 DOI: <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i2.3720>
- Shinkafi, Akilu Aliyu, Sani Yahaya, dan Tijjani Alhaji Sani. Realising financial inclusion in Islamic finance. *Journal of Islamic Marketing* Vol. 11 No. 1, 2020 pp. 143-160. DOI 10.1108/JIMA-02-2017-0020
- Wijaya, Ibrahim Fatwa, Arif Rahman Hakim, Nugroho Saputro, dan Mulyadi Mulyadi. Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: the case of Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*. DOI 10.1108/JIMA-09-2018-0160